

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR: 555/5373/DISKOMINFO
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2026

DAFTAR KLASIFIKASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h	- Mengungkap data pribadi ASN - Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h	- Mengungkap data pribadi ASN - Melanggar HAM - Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

3	Daftar Nilai SKP ASN	• - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	• Mengungkap data pribadi ASN	• Melindungi data pribadi ASN	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
			• melanggar HAM	• Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu	
			• bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu	• Menghindari keberatan atau gugatan hukum	
			• Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan		
4	Rekam Medis/Resume Medis	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2	▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis	• Menjaga rahasia pribadi seseorang (pasien dan keluarga)	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
		• UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2	• Tuntutan Pasien / keluarga kepada RS		
		• UU No. 14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i			
5	Visum et Repertum (VeR)	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2	• Dapat mengungkap rahasia pribadi	• Menjaga rahasia pribadi	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
		• -Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 187 huruf c	• Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan	• Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan	
		• -Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2			
		• -KUHP Pasal 184 ayat (1) dan pasal 187 huruf c			

6	Laporan Penggunaan Sediaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor	UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
				Melindungi data rahasia pribadi	
7	Informasi Hasil Audit Material Prenatal	UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
				-Melindungi data rahasia pribadi	
8	Hasil Skrening Penderita HIV-AIDS	UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
				-Melindungi data rahasia pribadi	
9	Hasil Pemeriksaan Penderita TB dan Penyakit Menular Lainnya	UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
				-Melindungi data rahasia pribadi	
10	Lokasi Server/Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	-Mengamankan data elektronik	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintah secara tertulis
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b	- Mencegah tindakan pencurian - Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminal lainnya - Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu		
11	Private Internet Protocol (IP) address dan range IP yang digunakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b			

12	Bandwitch management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30	Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch	Selama masih aktif
			Username dan password bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan	Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	
13	Username dan Password pengguna aplikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf c angka 6	Username dan password bagian dari system persandian negara yang dijamin kerahasiaannya	Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan daerah/negara	Selama masih aktif digunakan
14	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10	-Penyalahgunaan oleh pihak lain	Mencegah penyalahgunaan	Selama masih aktif
				oleh pihak lain	
				Menjaga keamanan jaringan komputer	
15	Sistem Keamanan Elektroknik berupa Rekaman CCTV	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Terbuka, apabila ada perintah pengadilan/ Penegak Hukum/lembaga pemerintah secara tertulis
		UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i	Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan	Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan	
		UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	
				Melindungi privasi data wajib pajak pribadi	
16	Sistem Management Basis Data (SMBD)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif digunakan atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b			

17	Topologi atau konfigurasi jaringan, aplikasi, dan infrastruktur data center	-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
		UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b			
18	Surat/Dokumen/Informasi Persandian	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 54 ayat 1	Tersebar nya isi surat rahasia Negara	Pengamanan informasi	Selama belum tiba ke tujuan surat
19	Informasi perkara yang masih dalam proses pembuktian di pengadilan	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dalam hal kepastian hukum suatu dokumen	Sampai dengan Proses Pengadilan selesai diputus oleh hakim (Inkraht)
		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP			
20	Bahan/Data Pemeriksaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Membahayakan pelapor	Melindungi pelapor	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
			Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan	Mencegah adanya gugatan hukum	
			Memungkinkan penyalahgunaan informasi	Mencegah penyalahgunaan informasi	
21	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi, Saksi Ahli, dan Tersangka) dalam proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan	UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3)	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
22	Data Identitas Pribadi Pengadu dugaan pelanggaran norma Ketenagakerjaan	UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi indentitas Pengadu yang bersifat pribadi	Sampai selesainya proses penyelidikan dan penyidikan oleh APH.

		• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j • Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4	• Retaliasi (PHK, intimidasi) terhadap pelapor dan terciptanya efek mendinginkan, yang membuat masyarakat takut melapor. Akibatnya, penegakan hukum ketenagakerjaan akan lumpuh	• Memberikan perlindungan mutlak terhadap pelapor dari segala bentuk retaliasi seperti PHK atau intimidasi, membangun kepercayaan publik terhadap sistem pengaduan, yang mendorong peningkatan jumlah laporan akurat serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengawasan norma ketenagakerjaan, menjamin keadilan bagi pekerja/serikat/pengusaha.	Dapat dibuka jika ada persetujuan yang bersangkutan
23	Anjuran Mediator dalam Perselisihan Hubungan Industrial	• UU Nomor 14 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j	Menyebabkan pihak- pihak bersikap kaku dan menghilangkan fleksibilitas kompromi karena adanya tekanan publik serta mengurangi peluang damai dan merusak kepercayaan pada mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa yang aman dan netral.	Melindungi komitmen negosiasi para pihak (Perusahaan dan Pekerja/Serikat), memberi ruang bagi para pihak untuk mempertimbangkan Anjuran tanpa harus bersikeras pada tuntutan awal, dan menghindari pengaruh tekanan publik atau pihak eksternal yang dapat bias.	Sampai seluruh tahapan mediasi selesai. Dapat dibuka jika ada persetujuan dari kedua belah pihak
		• UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4			
		• UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 12 ayat (3)			
		• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi Pasal 9			
24	Berita acara mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Melanggar kerahasiaan inti proses, menghancurkan kepercayaan para pihak, dan mengakibatkan kedua belah pihak enggan	Melindungi integritas dan efektivitas proses mediasi, mendorong para pihak untuk bernegosiasi secara terbuka dan jujur, serta mempertahankan kepercayaan penuh (bona fide) para pihak terhadap sistem penyelesaian sengketa alternatif.	Sampai seluruh tahapan mediasi selesai. Dapat dibuka jika ada persetujuan dari kedua belah pihak
		• UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4			

		UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 12 ayat (3)	berkompromi secara jujur di masa depan serta mendorong lebih banyak sengketa langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial, yang berarti memperpanjang dan memperumit penyelesaian perselisihan.		
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi Pasal 9			
25	Data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor	- UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j - UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersebar nya data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll.	Melindungi privasi data wajib pajak pribadi	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
26	Data pribadi wajib pajak air permukaan	- UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j - UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersebar nya data pribadi wajib pajak air permukaan yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll.	Melindungi privasi data wajib pajak pribadi	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
27	Data Usulan Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i	Mengganggu dan menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Menjaga kondusifitas proses penyusunan atau pengambilan Keputusan	Setelah proses pengusulan selesai dan sudah ada keputusan tetap
			Dapat merugikan Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan	- Menjaga keamanan pengambilan kebijakan - Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN	

28	Nilai Hasil Ujian Peserta Pelatihan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17	Mengungkap rahasia nilai hasil ujian peserta pelatihan	Melindungi nilai hasil ujian peserta pelatihan	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dan telah disetujui oleh Pemeriksa dan Pimpinan OPD
29	Naskah Soal UN/UNBK/UASBN	- Pasal 362 KUHP - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1)	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
30	Proses Scanning/Scoring UN/UNBK/UASON	- Pasal 362 KUHP - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1)	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
31	Source Code (basic Desain) Website dan Aplikasi	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintah secara tertulis
32	Data Center Room	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan informasi	- Menghindari serangan hacker - Melindungi hak privat - Mencegah penyalahgunaan	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
33	Rencana Awal Investasi Asing dan Dalam Negeri	- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2 - UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 5	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat	Sampai ada keputusan dan kesepakatan pihak berwenang yang berkekuatan hukum
34	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Penyalahgunaan Data pribadi - Mendapat gugatan dari yang bersangkutan	Melindungi data pribadi seseorang	Sampai ada keputusan hukum yang tetap

35	Data Kependudukan Perseorangan	• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	• Dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana	• Dapat menjamin kerahasiaan data pribadi setiap orang	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
		• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
36	Identitas pribadi Pelapor/Pengadu (datang langsung/telepon)	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	• Mengungkap rahasia informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	• Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor	Terbuka jika ada persetujuan yang bersangkutan secara tertulis
			• Membahayakan pelapor	• Mencegah adanya gugatan hukum	
			• Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan	• Mencegah penyalahgunaan informasi	
			• Memungkinkan penyalahgunaan informasi	• Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik	
37	Informasi Administrasi layanan Meliputi:	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	• Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	• Melindungi hak pribadi klien •	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
	1. Informed Consent atau Lembar Persetujuan Pelayanan	• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis		
	2. Form pengaduan dan hasil assesmen klien	• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak			

	3. Laporan hasil pemeriksaan psikologis	• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual			
	4. Laporan hasil klarifikasi	• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
	5. Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak	• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
	6. Laporan hasil tindak lanjut layanan				
	7. Dokumentasi Pelayanan berupa Foto, Video, Rekaman Audio DLL				
38	Identitas pribadi terlapor	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	• Menghormati hak praduga tak bersalah terlapor	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
39	Permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	• Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang
		• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.			
		• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.			
		• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual			

		• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
		• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
40	Alamat rumah aman	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan demi menjamin keamanan klien	• Perlindungan terhadap klien	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang
		• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.			
		• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.			
		• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual			
		• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
		• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
41	Data reintegrasi korban:	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	• Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

	1. Berita Acara Penyerahan Klien	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis		
	2. Surat Tanda Terima Barang klien	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.			
	3. Surat Pernyataan Orang Tua klien	Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual			
		Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
		Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
42	Informasi administrasi rujukan tingkat antar pusat provinsi maupun kabupaten meliputi:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
	1. Akta Cerai	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis		
	2. Laporan sosial	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.			
	3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan	Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual			

	4. Laporan Polisi	• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
	5. DII.	• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
43	Surat Terminasi	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	• Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
		• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis		
		• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.			
		• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual			
		• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
		• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
44	Identitas Pribadi Pelanggar Perda dan Perkada	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	• Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan layanan

45	Data hutang pasien kepada rumah sakit	UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3	Mengungkap rahasia pribadi seseorang: diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis.	Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan	Dibuka apabila: - Mendapat ijin tertulis dari yang bersangkutan atau dari ahli waris - Pada saat diminta auditor internal dan eksternal - Saat diserahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
			Berpotensi menimbulkan tuntutan pasien/keluarga pasien kepada RS	Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan	
46	Identitas Pasien HIV/Penyakit Menular dan ODGJ	UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4	Diskriminasi & stigma	Perlindungan HAM	Selama aturan masih berlaku
47	Arsip dinamis berupa Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi	Terbuka jika ada persetujuan dari ahli waris
		UU no 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)			
48	Informasi Akses Daftar Barang (KIB) pada aplikasi Penatausahaan BMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	- UUNo. 14 Tahun 2008 Tentang KIP - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b - Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

49	Informasi Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Selatan meliputi : 1. Sertifikat 2. BPKB 3. Lisensi	• UUNo. 14 Tahun2008 Tentang KIP • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.	Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
----	--	---	---	---	--

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Atasan PPID Provinsi Sulawesi Selatan



PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Rabu tanggal Sebelas Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Command Center Gedung A, Lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Akan Dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h	- Mengungkap data pribadi ASN - Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h	- Mengungkap data pribadi ASN - Melanggar HAM - Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

3	Daftar Nilai SKP ASN	- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	• Mengungkap data pribadi ASN • melanggar HAM • bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu • Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	• Melindungi data pribadi ASN • Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu • Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
4	Rekam Medis/Resume Medis	• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 • UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2 • UU No. 14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i	▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis • Tuntutan Pasien / keluarga kepada RS	• Menjaga rahasia pribadi seseorang (pasien dan keluarga)	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
5	Visum et Repertum (VeR)	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 • -Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 187 huruf c • -Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2 • -KUHAP Pasal 184 ayat (1) dan pasal 187 huruf c	• Dapat mengungkap rahasia pribadi • Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan	• Menjaga rahasia pribadi • Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
6	Laporan Penggunaan Sediaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor	• UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7	• Penyalahgunaan oleh pihak lain	• Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan • Melindungi data rahasia pribadi	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang

7	Informasi Hasil Audit Material Prenatal	UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
				-Melindungi data rahasia pribadi	
8	Hasil Skrening Penderita HIV-AIDS	UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
				-Melindungi data rahasia pribadi	
9	Hasil Pemeriksaan Penderita TB dan Penyakit Menular Lainnya	UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
				-Melindungi data rahasia pribadi	
10	Lokasi Server/Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	-Mengamankan data elektronik	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintah secara tertulis
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b	- Mencegah tindakan pencurian - Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminil lainnya - Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu		
11	Private Internet Protocol (IP) address dan range IP yang digunakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b			
12	Bandwitch management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30	Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch	Selama masih aktif

			• Username dan password bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan	• Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan	
13	Username dan Password pengguna aplikasi	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf c angka 6	• Username dan password bagian dari system persandian negara yang dijamin kerahasiaannya	• Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan daerah/negara	Selama masih aktif digunakan
14	Kode Akses Elektronik	• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10	• -Penyalahgunaan oleh pihak lain	• Mencegah penyalahgunaan • oleh pihak lain • Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
15	Sistem Keamanan Elektroknik berupa Rekaman CCTV	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j • UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b	• Dapat mengungkap rahasia pribadi • Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan • Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	• Menjaga rahasia pribadi • Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan • Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Terbuka, apabila ada perintah pengadilan/ Penegak Hukum/lembaga pemerintah secara tertulis
				• Melindungi privasi data wajib pajak pribadi	
16	Sistem Management Basis Data (SMBD)	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b	• Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	• Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif digunakan atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
17	Topologi atau konfigurasi jaringan, aplikasi, dan infrastruktur data center	• -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J • UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b	• Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	• Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

18	Surat/Dokumen/Informasi Persandian	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 54 ayat 1	Tersebar nya isi surat rahasia Negara	Pengamanan informasi	Selama belum tiba ke tujuan surat
19	Informasi perkara yang masih dalam proses pembuktian di pengadilan	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dalam hal kepastian hukum suatu dokumen	Sampai dengan Proses Pengadilan selesai diputus oleh hakim (Inkraht)
		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP			
20	Bahan/Data Pemeriksaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Membahayakan pelapor	Melindungi pelapor	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
			Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan	Mencegah adanya gugatan hukum	
			Memungkinkan penyalahgunaan informasi	Mencegah penyalahgunaan informasi	
21	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi, Saksi Ahli, dan Tersangka) dalam proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan	UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3)	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
22	Data Identitas Pribadi Pengadu dugaan pelanggaran norma Ketenagakerjaan	- UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j - Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi indentitas Pengadu yang bersifat pribadi	Sampai selesainya proses penyelidikan dan penyidikan oleh APH. Dapat dibuka jika ada persetujuan yang bersangkutan
			Retaliasi (PHK, intimidasi) terhadap pelapor dan terciptanya efek mendinginkan, yang membuat masyarakat takut melapor. Akibatnya, penegakan hukum ketenagakerjaan akan lumpuh	Memberikan perlindungan mutlak terhadap pelapor dari segala bentuk retaliasi seperti PHK atau intimidasi, membangun kepercayaan publik terhadap sistem pengaduan, yang mendorong peningkatan jumlah laporan akurat serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengawasan norma ketenagakerjaan, menjamin keadilan bagi pekerja/serikat/pengusaha.	

23	Anjuran Mediator dalam Perselisihan Hubungan Industrial	• UU Nomor 14 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j	Menyebabkan pihak- pihak bersikap kaku dan menghilangkan fleksibilitas kompromi karena adanya tekanan publik serta mengurangi peluang damai dan merusak kepercayaan pada mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa yang aman dan netral.	Melindungi komitmen negosiasi para pihak (Perusahaan dan Pekerja/Serikat), memberi ruang bagi para pihak untuk mempertimbangkan Anjuran tanpa harus bersikeras pada tuntutan awal, dan menghindari pengaruh tekanan publik atau pihak eksternal yang dapat bias.	Sampai seluruh tahapan mediasi selesai. Dapat dibuka jika ada persetujuan dari kedua belah pihak
		• UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4			
		• UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 12 ayat (3)			
		• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi Pasal 9			
24	Berita acara mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j	Melanggar kerahasiaan inti proses, menghancurkan kepercayaan para pihak, dan mengakibatkan kedua belah pihak enggan berkompromi secara jujur di masa depan serta mendorong lebih banyak sengketa langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial, yang berarti memperpanjang dan memperumit penyelesaian perselisihan.	Melindungi integritas dan efektivitas proses mediasi, mendorong para pihak untuk bernegosiasi secara terbuka dan jujur, serta mempertahankan kepercayaan penuh (bona fide) para pihak terhadap sistem penyelesaian sengketa alternatif.	Sampai seluruh tahapan mediasi selesai. Dapat dibuka jika ada persetujuan dari kedua belah pihak
		• UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4			
		• UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselihan Hubungan Industrial Pasal 12 ayat (3)			
		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi Pasal 9			

25	Data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor	• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j	• Tersebar nya data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll.	• Melindungi privasi data wajib pajak pribadi	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
		• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
26	Data pribadi wajib pajak air permukaan	• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j	• Tersebar nya data pribadi wajib pajak air permukaan yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll.	• Melindungi privasi data wajib pajak pribadi	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
		• UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
27	Data Usulan Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural	• UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i	• Mengganggu dan menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	• Menjaga kondusifitas proses penyusunan atau pengambilan Keputusan	Setelah proses pengusulan selesai dan sudah ada keputusan tetap
			• Dapat merugikan Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan	• Menjaga keamanan pengambilan kebijakan • Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN	
28	Nilai Hasil Ujian Peserta Pelatihan	• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17	• Mengungkap rahasia nilai hasil ujian peserta pelatihan	• Melindungi nilai hasil ujian peserta pelatihan	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dan telah disetujui oleh Pemeriksa dan Pimpinan OPD
29	Naskah Soal UN/UNBK/UASBN	• Pasal 362 KUHP	• Membocorkan rahasia negara	• Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
		• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1)			

30	Proses Scanning/Scoring UN/UNBK/UASON	• Pasal 362 KUHP	• Membocorkan rahasia negara	• Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
		• UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1)			
31	Source Code (basic Desain) Website dan Aplikasi	• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b	• Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan	• Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintah secara tertulis
32	Data Center Room	• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	• Penyalahgunaan informasi	• Menghindari serangan hacker	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
				• Melindungi hak privat	
				• Mencegah penyalahgunaan	
33	Rencana Awal Investasi Asing dan Dalam Negeri	• UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2	• Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat	• Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat	Sampai ada keputusan dan kesepakatan pihak berwenang yang berkekuatan hukum
		• UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 5			
34	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	• UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	• Dapat mengungkap rahasia pribadi	• Melindungi data pribadi seseorang	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
			• Penyalahgunaan Data pribadi		
			• Mendapat gugatan dari yang bersangkutan		
35	Data Kependudukan Perseorangan	• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	• Dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana	• Dapat menjamin kerahasiaan data pribadi setiap orang	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
		• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
36	Identitas pribadi Pelapor/Pengadu (datang langsung/telepon)	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	• Mengungkap rahasia informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	• Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor	Terbuka jika ada persetujuan yang bersangkutan secara tertulis

			• Membahayakan pelapor	• Mencegah adanya gugatan hukum	
			• Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan	• Mencegah penyalahgunaan informasi	
			• Memungkinkan penyalahgunaan informasi	• Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik	
37	Informasi Administrasi layanan Meliputi:	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	• Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	• Melindungi hak pribadi klien •	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
	1. Informed Consent atau Lembar Persetujuan Pelayanan	• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis		
	2. Form pengaduan dan hasil assesmen klien	• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak			
	3. Laporan hasil pemeriksaan psikologis	• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
	4. Laporan hasil klarifikasi				
	5. Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak				
	6. Laporan hasil tindak lanjut layanan				
	7. Dokumentasi Pelayanan berupa Foto, Video, Rekaman Audio DLL				

38	Identitas pribadi terlapor	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	• Menghormati hak praduga tak bersalah terlapor	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
39	Permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	• Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang
		• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.			
		• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.			
		• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual			
		• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
		• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
40	Alamat rumah aman	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan demi menjamin keamanan klien	• Perlindungan terhadap klien	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang

		2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
41	Data reintegrasi korban:	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	• Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
	1. Berita Acara Penyerahan Klien	• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis		
	2. Surat Tanda Terima Barang klien	• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.			
	3. Surat Pernyataan Orang Tua klien	• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual			
		• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
		• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			

42	Informasi administrasi rujukan tingkat antar pusat provinsi maupun kabupaten meliputi: 1. Akta Cerai 2. Laporan sosial 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan 4. Laporan Polisi 5. Dll.	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu • Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	• Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
43	Surat Terminasi	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual • Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu • Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis	• Menjaga data yang bersifat rahasia	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

44	Identitas Pribadi Pelanggar Perda dan Perkada	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan layanan
45	Data hutang pasien kepada rumah sakit	UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3	Mengungkap rahasia pribadi seseorang: diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis.	Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan	Dibuka apabila: - Mendapat ijin tertulis dari yang bersangkutan atau dari ahli waris - Pada saat diminta auditor internal dan eksternal - Saat diserahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)
			Berpotensi menimbulkan tuntutan pasien/keluarga pasien kepada RS	Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan	
46	Identitas Pasien HIV/Penyakit Menular dan ODGJ	UU No. 27 Tahun 20 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4	Diskriminasi & stigma	Perlindungan HAM	Selama aturan masih berlaku
47	Arsip dinamis berupa Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi	Terbuka jika ada persetujuan dari ahli waris
		UU no 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2)			
48	Informasi Akses Daftar Barang (KIB) padaaplikasi Penatausahaan BMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	- UUNo. 14 Tahun 2008 Tentang KIP - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b - Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan	Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

		dengan tertib dan aman. · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara			
49	Informasi Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Selatan meliputi : 1. Sertitifikat 2. BPKB 3. Lisensi	· UUNo. 14 Tahun2008 Tentang KIP · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara · Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.	Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

